
PENDIDIKAN MASYARAKAT BENTENG ALLA DI TENGAH PERGOLAKAN DI/ TII (1950-1961)

BENTENG ALLA SOCIETY EDUCATION AMID UPHEAVAL DI/ TII (1950-1961)

Abd. Rahman

SMAN 16 Makassar

Jln. Amanagappa No. 8, Baru, Kota Makassar, Sulawesi Barat, Indonesia

abd.rahman11@ui.ac.id

Abdurakhman

Magister Ilmu Sejarah dan Departemen Sejarah Universitas Indonesia

Jln. Prof. Dr. Selo Soemardjan Kampus, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Indonesia

abdurakhman.hum@ui.ac.id

Diterima tanggal 30 September 2022

Disetujui tanggal 23 Juni 2023

ABSTRACT

This paper aims to analyze the efforts of Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) in realizing the formation of the Indonesian Islamic State amid the Indonesian National Army's operations through educational aspects. This paper questions how the development of education provided by DI/TII to the people in its territory or conflict situation. The discussion is studied using historical methods with oral sources within the concepts of education and conflict. The conflict has always been synonymous with disruption and destruction of education; however, this historical study shows that education was intensified in conflict areas and used as a propaganda medium for DI/TII. This article presents the different conditions of education in areas controlled by the TNI and those controlled by DI/ TII. The results show that education for the people of Benteng Alla is still running despite being in a conflict situation between DI/TII and TNI. However, the education provided was built on the basis of DI/TII's interest to establish an Islamic State so that it was not under state supervision.

Keywords: *education and conflict, Benteng Alla, DI/ TII, Enrekang, and Tentara Nasional Indonesia.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dalam mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia di tengah-tengah operasi Tentara Nasional Indonesia melalui aspek pendidikan. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana perkembangan pendidikan yang diberikan oleh DI/TII terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya atau situasi konflik. Pembahasan dikaji menggunakan metode sejarah dengan sumber lisan dalam kerangka konsep pendidikan dan konflik. Konflik selama ini selalu identik dengan terganggu dan hancurnya pendidikan, namun studi sejarah ini justru

menunjukkan bahwa pendidikan digencarkan di wilayah-wilayah konflik digunakan sebagai media propaganda bagi DI/TII. Artikel ini menyajikan perbedaan kondisi pendidikan di daerah yang dikuasai oleh TNI dan yang dikuasai oleh DI/ TII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi masyarakat Benteng Alla masih berjalan meskipun berada dalam situasi konflik antara DI/ TII dan TNI. Namun, pendidikan yang diberikan dibangun atas dasar kepentingan DI/ TII untuk mendirikan Negara Islam sehingga tidak berada dalam pengawasan negara.

Kata kunci: pendidikan dan konflik, Benteng Alla, DI/ TII, Enrekang, dan Tentara Nasional Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan di tahun 1945, perjalanan yang lebih terjal untuk memperoleh keamanan di negeri sendiri justru memasuki babak baru. Pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan, seperti PRRI-Permesta, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, hingga gerakan Darul Islam yang diprakarsai oleh Kartosuwirjo akibat ketidakpuasannya terhadap hasil Perundingan Renville yang membuat wilayah Indonesia semakin menyempit (Ricklefs 2005:457).

Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampang, Jawa Barat (Dijk 1983:83). Menurut Gonggong (1992:1), demi menopang keberlangsungan Negara Islam Indonesia yang dibentuknya maka Kartosuwirjo membentuk Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) untuk menentang Pemerintahan Republik Indonesia.

Gerakan Darul Islam kemudian dengan cepat meluas ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, hingga Sulawesi Selatan. Gerakan DI/

TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahar Mudzakkar merupakan pemberontakan terlama dari gerakan Darul Islam. Gerakan yang dipimpinnya hingga 15 tahun ini menyebar hingga ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Penolakan Kawilarang selaku Panglima Tentara dan Teritorium (TT) VII/ Wirabuana terhadap keinginan Qahar Mudzakkar dan pasukannya untuk menjadi Brigade atau Resimen Hasanuddin merupakan awal dari kekacauan yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan. Setelah kejadian tersebut, Qahar kemudian dilarikan oleh anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menuju ke Markas KGSS Batalyon Bau Massepe di Pinrang. Mereka kemudian memasuki hutan dan menuju markas KGSS Massenrempulu di bawah pimpinan Andi Sose (Aqamuz 2001:237). Demikianlah awal mula Qahar mengenal wilayah Enrekang dan sekitarnya. Wilayah ini kemudian menjadi salah satu markas besarnya.

Semakin kuatnya posisi Qahar di hutan membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memburu Qahar dan pasukannya yang berakibat pada kekacauan yang terjadi. Masyarakat menjadi korban dari pertikaian dua

golongan ini. Salah satu bagian yang terdampak adalah kondisi pendidikan.

Pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan dengan tujuan menghasilkan pegawai rendah yang bekerja pada bagian administrasi. Pendidikan yang tersedia tidak lebih dari pendidikan sekolah rendah. Akibatnya, keterbelakangan pendidikan ini berlanjut hingga periode setelah kemerdekaan. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) menyebutkan bahwa dari delapan juta penduduk Makassar tidak ada seorang pun yang mencapai gelar sarjana bahkan sekolah menengahnya saja tidak ada (Gonggong 1992:35-36). Sebagian besar masyarakat dalam kondisi buta huruf. Adapun pendidikan tradisional yang telah lama ada adalah pengajaran membaca Al-Qur'an yang disebut dengan *mangngaji* serta pengenalan aksara tradisional yang dikenal dengan nama *hurupu Ogi-Mangkasara* atau lebih dikenal dengan nama huruf Lontara.

Kondisi pendidikan Sulawesi Selatan masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra ataupun Jawa. Kondisi ini semakin memburuk seiring dengan bergabungnya Qahar Mudzakkar dalam gerakan DI/ TII Kartosuwirjo di Jawa Barat. Pertikaian DI/ TII dan TNI mengakibatkan terjadinya pembatasan wilayah. Qahar telah menginstruksikan adanya garis pemisah yang nyata antara daerah *de facto* Darul Islam dengan kota-kota yang diduduki oleh TNI (Mattalioe 1965:38).

Adanya pemisahan wilayah ini kemudian berpengaruh pada pendidikan masyarakat setempat. Sekolah-sekolah

yang letaknya berada di wilayah kekuasaan DI/ TII diambil alih oleh pasukan DI/TII. Selanjutnya mereka memberikan pendidikan kepada masyarakat yang berada di wilayah penguasaan mereka. Namun, pendidikan yang diberikan oleh pasukan DI/ TII tidak diakui oleh pemerintah yang sah sehingga dianggap tidak legal (Pilang 2008:100).

Kondisi inipun terjadi di Benteng Alla, sebuah daerah yang saat ini berada di perbatasan Enrekang dan Toraja Barat. Daerah ini tergolong terpencil dan tidak seluas wilayah Baraka yang menjadi basis utama dari DI/ TII di Enrekang. Namun, secara geografis Benteng Alla memiliki posisi yang menguntungkan bagi pergerakan DI/ TII. Wilayahnya yang berada di pegunungan dan perbatasan antara Enrekang dan Toraja dapat menjadi jalan bagi DI/ TII untuk memperluas wilayah kekuasaan dan pergerakannya hingga ke Tana Toraja.

Untuk merealisasikan hal tersebut Qahar Mudzakkar dan pasukannya dapat memasuki wilayah Toraja dengan mudah setelah terlebih dahulu menguasai daerah Benteng Alla karena posisinya yang jauh dari kota serta jalan poros (Rahman 2020:43-44). Daerah ini berbatasan dengan wilayah-wilayah seperti Rano, Buakayu, serta Gandang Batu yang termasuk dalam wilayah administrasi Tana Toraja. Wilayah Benteng Alla yang berada di pedalaman hanya dapat dicapai dengan menunggang kuda ataupun berjalan kaki saja karena akses jalan yang belum baik (Yusuf 2018).

Masyarakat Benteng Alla yang merupakan masyarakat agraris, wilayah

yang jauh dari kota, dan adanya perilaku kurang baik dari TNI kepada masyarakat Benteng Alla menyebabkan masyarakat Benteng Alla lebih memilih untuk mengikuti DI/ TII daripada TNI (Lewa 2018).

Kajian tentang DI/ TII di Sulawesi Selatan sendiri telah dilakukan oleh beberapa penulis. Gonggong (1992) dalam disertasinya membahas DI/TII secara umum di Sulawesi Selatan. Tesis dari Universitas Indonesia yang ditulis oleh Kabubu (2017) berfokus pada DI/ TII di Toraja yang berada di bawah pengawasan penuh TNI. Demikian juga tulisan Sitonda (2014) yang mengkaji DI/ TII di Massenrempulu. Ketiga tulisan tersebut membahas DI/ TII secara umum di daerah masing-masing. Ketiganya belum menelusuri aktivitas DI/ TII dalam membangun kekuatannya di daerah yang telah mereka kuasai termasuk melalui aktivitas di bidang pendidikan.

Berfokus pada aspek pendidikan di daerah kekuasaan DI/ TII, dalam konteks yang lebih luas, tulisan ini ditempatkan pada diskusi mengenai persoalan pendidikan pada situasi konflik. Salah satu artikel yang membahas hal tersebut adalah *Kesan Perang terhadap Pendidikan di Berbagai Negara* karya Saifuddin (2013:120-128) yang membahas berbagai kondisi di berbagai negara akibat perang. Artikel ini menyimpulkan bahwa tidak ada kesan positif yang dihadirkan oleh perang terutama di bidang pendidikan. Perang mengganggu situasi pendidikan serta merusak sarana dan prasarana pendidikan. Berbeda dengan artikel lainnya, artikel ini justru mengajukan

temuan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang digiatkan pada situasi konflik.

Kondisi berbeda yang dihadirkan oleh DI/ TII dalam mengelola pendidikan pada masyarakat dipengaruhi pembagian wilayah kekuasaan di Enrekang antara TNI dengan DI/ TII. Sulitnya TNI menjangkau wilayah DI/ TII membuat pendidikan di wilayah ini dapat terlaksana dengan baik. DI/ TII yang menggunakan taktik perang gerilya sehingga masyarakat di wilayah tersebut hidup seperti masyarakat pada umumnya. Usaha TNI memasuki wilayah DI/ TII tidak selalu berhasil karena adanya penjagaan yang ketat oleh DI/ TII.

Penguasaan Benteng Alla sebagai salah satu wilayah kekuasaan DI/ TII mengharuskan masyarakat mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh DI/ TII. Salah satunya adalah pendidikan. Sebelumnya, telah ada sekolah di daerah ini namun diambil alih oleh DI/ TII. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh DI/ TII cenderung tertutup dan sangat sulit dijangkau karena berada di tengah hutan (Yusuf 2018).

Kenyataan tersebut dilihat dalam tulisan Abd. Rahman yang berjudul *Gerakan DI/ TII di Benteng Alla Kabupaten Enrekang (1953-1965)*. Fokus kajian tulisan ini sebenarnya adalah penguasaan wilayah dan pergerakan pasukan DI/ TII di Benteng Alla termasuk aktivitas pendidikan. Namun bahasan tentang pendidikan tidak dibahas secara detail. Oleh karenanya, penulis menganggap pengembangan lebih lanjut terhadap tulisan ini perlu dilakukan dengan

terfokus pada dinamika pendidikan di tengah konflik.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut, artikel ini merumuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana DI/ TII dapat memberikan pendidikan formal pada masyarakat Benteng Alla, serta bagaimana pendidikan nonformal dan informal dijalankan oleh DI/ TII. Secara umum, tulisan ini menganalisis kondisi pendidikan di Benteng Alla sebagai salah satu wilayah kekuasaan DI/ TII.

Tulisan ini menggunakan konsep mengenai pendidikan dan konflik sebagai kerangka diskusi. Pendidikan dan konflik menurut Smith (2009) merupakan dua hal yang dapat saling terkait jika keduanya muncul dalam proses pembangunan negara tanpa memandang identitas etnik yang kadang memunculkan konflik. Karena itulah, pendidikan dapat menjadi instrumen kunci dalam hal pembentukan ideologi yang lebih dominan dalam pembangunan negara. Smith lebih lanjut menguraikan bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk pengembangan ideologi. Aspek pendidikan menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh DI/ TII Sulawesi Selatan dalam rangka menanamkan ideologi Negara Islam. Benteng Alla hanya satu dari sekian banyak daerah yang telah berada di bawah pengaruh DI/ TII yang semuanya nanti akan disatukan sebagai bagian dari pembentukan Negara Islam di Sulawesi Selatan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, serta

historiografi. Pada tahapan pengumpulan data atau heuristik, data lebih banyak berasal dari penuturan narasumber. Sumber berupa arsip sulit ditemukan mengingat wilayah penelitian merupakan bekas wilayah DI/ TII yang tidak berada di bawah pengawasan negara. Adapun penguatan sumber data tekstual diperoleh dari beberapa buku penunjang terkait dan penelusuran arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip utama yang digunakan adalah arsip dari Pemerintah Tingkat II Enrekang. Arsip penunjang berupa Arsip Tana Toraja, terutama arsip untuk wilayah Toraja yang berbatasan dengan Benteng Alla seperti Rano, Buakayu, serta Gandang Batu Silannan. Dengan demikian, sumber wawancara ditempatkan pada urutan pertama dalam tulisan ini, walau sumber-sumber buku tidak dilupakan guna membangun narasi awal penulis dalam menggambarkan kondisi pendidikan saat itu.

Beberapa sumber data tersebut tentunya harus melalui tahapan kritik baik internal maupun eksternal untuk memastikan data yang diperoleh sejalan dan sesuai dengan objek penelitian dalam tulisan ini. Pada tahap ini, data seputar kondisi masyarakat dan pendidikan di Benteng Alla yang ditemukan di arsip sedikit berbeda dengan data wawancara yang diperoleh di lapangan. Data arsip menyebut bahwa kondisi sekolah di Benteng Alla dan sekitarnya tidak berjalan, sementara dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan di Benteng Alla tetap ada. Dari perbedaan ini, penulis menelusuri lebih jauh lagi tentang tahun dari arsip tersebut. Arsip yang berangka

tahun 1952 tersebut menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Baroko tidak berjalan lagi. Sedangkan informasi dari narasumber menyatakan bahwa SR VI Tahun Baroko yang letaknya lebih dekat dengan jalan poros sengaja dikosongkan dan siswa-siswa lebih banyak dipindahkan ke daerah yang berbatasan dengan Toraja. Karena itulah butuh sikap kehati-hatian dalam penggunaan data arsip pada wilayah yang dikuasai langsung oleh DI/ TII seperti Benteng Alla ini.

Tahap berikutnya ialah interpretasi yang menentukan hubungan kausalitas antara berbagai data sejarah dalam menetapkan fakta sejarah. Informasi tentang SR VI Tahun Baroko yang tidak difungsikan dan informasi tentang lokasi SR VI Tahun Baroko dari narasumber, diinterpretasikan penulis sebagai fakta bahwa lokasi SR VI Tahun Baroko yang lebih dekat dari jalan poros Enrekang-Toraja menjadi alasan DI/ TII mengosongkan sekolah ini untuk menghindari operasi dari TNI. Fakta-fakta yang telah diperoleh seperti ini kemudian dimaknai dan diposisikan secara kronologis dan tematis sehingga seluruh data dapat memberikan informasi yang aktual bagi pembacanya ketika telah sampai pada tahapan historiografi.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Arti Pendidikan Bagi DI/ TII

Keinginan untuk mendirikan Negara Islam diwujudkan oleh DI/ TII dengan menguasai beberapa wilayah. DI/ TII kemudian menjalankan pemerintahannya dengan merata di bidang hukum, sosial kemasyarakatan, ekonomi,

pembinaan kepercayaan masyarakat hingga pendidikan.

Mattalioe menyebut bahwa “aspek pendidikan menjadi salah satu bagian yang diperhatikan oleh DI/ TII dengan didirikannya sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan” (1994:241). DI/ TII memadukan materi pengetahuan umum dengan mata pelajaran agama dalam pembelajaran. Melalui pendirian sekolah inilah terbentuk kader-kader yang bersemangat Islam dengan pemahaman yang mencakup konsep-konsep perjuangan dalam Islam.

Melalui pendidikan, DI/ TII membentuk generasi-generasi yang dapat membantu dalam mewujudkan Negara Islam. Keseriusan DI/ TII dalam membangun pendidikan di wilayah kekuasaannya diperkuat dengan ditunjuknya B.S. Baranti sebagai Menteri Pendidikan DI/ TII di hutan (Fikram 2021:81). Baranti kemudian mengorganisasi berbagai aspek pendidikan DI/ TII. Pendidikan DI/ TII digerakkan oleh tiga golongan (Galasa 2008:99-103). Golongan pertama adalah guru. DI/ TII menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup guru untuk mengajar sekolah-sekolah yang berada di bawah pengawasan mereka. Karena itulah DI/ TII melakukan teror penculikan terhadap guru-guru di sekolah lain untuk mengajar pada sekolah yang dikelola DI/ TII. Golongan kedua adalah imam. Imam berfokus pada pengajaran agama bagi masyarakat demi menerapkan syariat Islam di daerah-daerah yang dikuasai DI/ TII. Golongan yang terakhir adalah pelajar dan pemuda. Mereka diajarkan tentang nilai-nilai perjuangan agar dapat

mendukung gerakan DI/ TII sebagai pasukan tambahan. Sebagaimana yang diutarakan Kabubu (2017) bahwa para pelajar diwajibkan untuk turut serta dalam perjuangan revolusi demi terwujudnya Negara Islam.

Galasa menyatakan “melalui aspek pendidikan inilah kemudian DI/ TII menerapkan ideologi Islam mulai dari jenjang Sekolah Rakyat (SR) yang sasarannya adalah anak-anak usia sekolah” (2008:101). Selain itu, penduduk yang lebih dewasa juga tidak luput dari perhatian DI/ TII. Mereka diberi pengajaran pengenalan huruf dan cara berhitung. Melalui pendidikan, DI/ TII berupaya menjadikan masyarakatnya sebagai salah satu bagian dari pembangunan Negara Islam.

DI/ TII tidak membangun infrastruktur pendidikannya benar-benar dari awal. Mereka mengambil alih dan mengelola sekolah-sekolah yang telah ada sebelumnya. Demikian yang terjadi di Benteng Alla, DI/ TII memanfaatkan sekolah yang telah ada di wilayah ini.

2. Sekolah Formal di Era DI/ TII

DI/ TII membangun kekuatannya melalui pendidikan dengan mengatur sekolah-sekolah dari jenjang paling rendah yakni Sekolah Rakyat (SR) hingga paling tinggi yakni universitas. Selama gerakan DI/ TII berlangsung di Enrekang, Pilang (2008:100) menyatakan bahwa banyak sekolah-sekolah peninggalan Belanda yang tidak dapat berjalan dengan baik bahkan ada yang harus ditutup setelah munculnya teror penculikan terhadap pelajar. Sitonda mencatat sekitar 451 orang pelajar dari Enrekang mengungsi ke Makassar dan

mendapat bantuan dari pemerintah (2004:128). Selain pelajar, tenaga pengajar juga tidak luput dari kecemasan karena banyak di antara mereka yang menjadi korban penculikan dari pasukan DI/ TII.

Mobilisasi pelajar ke hutan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DI/ TII untuk memperkuat posisi mereka di masyarakat. Kabubu menyatakan terjadi pelarian pelajar sekitar 150 orang dari Tana Toraja mengikuti gerombolan masuk hutan. Mereka disatukan dalam sebuah kompi pelajar yang dilantik di Baroko, Enrekang. Mereka bertugas melakukan penerangan tentang Gerakan Qahar Mudzakkar kepada masyarakat di Toraja (Kabubu 2017:93). Kehadiran kompi pelajar semakin memperkuat wilayah Benteng Alla dan sekitarnya sebagai salah satu basis kuat DI/ TII yang berada di garis perbatasan dengan Toraja.

Sementara itu, masyarakat yang berada di bawah pengawasan DI/ TII, juga merasakan pendidikan formal sama seperti daerah lain yang masih berada di bawah pengawasan negara. Seperti kesaksian Lewa, di Benteng Alla Utara pada 9 September 2018 berikut.

Dulu kami, masih tetap bisa sekolah tapi diawasi sama tentaranya Qahar. Ada dua sekolah dulu, sudah sekolah lama, sekolahnya Belanda dulu. Satu di Baroko satu lagi di sini sekitar Redak, cuman memang jarang orang tahu sekarang tentang sekolah yang di Redak itu karena sudah tidak ada mi sekarang. Di situ mi kami diajar sama pasukannya DI. Dan aman-aman ji

kami rasa dulu, itupi na kami lari kalau ada TNI datang. Karena kami sudah ikut sama DI/ TII.

Pernyataan dari salah satu penduduk Benteng Alla ini menunjukkan bahwa DI/ TII memanfaatkan bangunan sekolah yang sudah ada untuk dikelola lebih lanjut. End menyebut ada dua sekolah bentukan Belanda dalam wilayah Distrik Baroko. Dua sekolah ini kemudian diambil alih oleh DI/ TII. Sekolah itu adalah Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Baroko dan Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Redak (2020:109). Selain itu, pendidikan terasa lebih aman pada wilayah DI/ TII karena sulitnya TNI memasuki wilayah DI/ TII. Kondisi ini berbeda dengan wilayah yang tidak dikuasai oleh DI/ TII yang terus terjadi teror dan kekacauan. DI/ TII kerap membakar sekolah hingga menculik guru-gurunya untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar di sekolah milik DI/ TII yang berada dalam kawasan hutan.

Secara geografis Sekolah Rakyat VI Tahun Baroko lebih dekat ke jalan poros daripada Sekolah Rakyat VI Tahun Redak. Posisi lokasi itulah yang menyebabkan DI/ TII mengosongkan Sekolah Rakyat VI Tahun Baroko untuk menghindari patroli-patroli yang gencar dilakukan oleh TNI sejak 1952. Informasi ini didapat dari laporan situasi daerah Duri berdasarkan laporan Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang 1890-1971 yang menyebutkan bahwa guru-guru yang ada di Cakke dan Kalosi tidak lagi memiliki hubungan dengan guru-guru yang ada di Distrik Baroko. Sejak 5 Oktober 1952 diketahui bahwa Sekolah Rakyat VI Tahun Baroko tidak berjalan

lagi. Nasib dari guru-gurunya pun tidak diketahui (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan a 2005).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa SR VI Tahun Baroko berhenti berfungsi sebagai sarana pendidikan formal bagi masyarakat namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang murid maupun guru-guru dari SR VI Tahun Baroko ini sejak akhir tahun 1952. Adanya Sekolah Rakyat VI Tahun Redak di wilayah Benteng Alla mengindikasikan bahwa baik guru dan siswa dari Sekolah Rakyat VI Tahun Baroko dipindahkan jauh ke pedalaman lagi untuk bergabung dengan SR VI Tahun Redak.

Kurikulum yang diterapkan DI/ TII di Benteng Alla ternyata secara tidak langsung menerapkan kurikulum sekolah formal. Kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk Sekolah Rakyat pada saat itu adalah kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 yang ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya (Muchlis, Musdalifah, Jumadi, dan Ridha 2019:95). Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf yang merupakan salah satu murid dari SR VI Tahun Redak, di Benteng Alla Utara, pada 21 Juli 2018 berikut.

Kami dulu yang sekolah di sekolahnya DI, sama dengan sekolah lain yang ada di Enrekang kota karena pelajarannya ya pelajaran umum juga seperti Bahasa Indonesia, belajar berhitung, ilmu alam sampai bahasa daerah.

Cuman ada materi-materi agama yang diajarkan ke kami dan materi agamanya itu setiap hari kadang pagi dikasih kadang juga mau mi pulang dikasih lagi materi tentang agama Islam.

Materi keagamaan yang diberikan DI/ TII kemudian menjadi ciri khas dari sekolah di bawah pengawasan DI/ TII. Hal ini turut menunjukkan bahwa sekolah-sekolah terutama Sekolah Rakyat berfungsi sebagai lembaga dakwah untuk menanamkan ideologi Darul Islam kepada anak didiknya. Regenerasi dari Darul Islam sebenarnya telah dipersiapkan oleh pasukan DI/ TII melalui pendidikan formal di setiap sekolah-sekolah DI/ TII. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Benteng Alla yang masih menganut paham animisme berupa ajaran Aluk Todolo.

Kedua sekolah di wilayah Distrik Baroko tidak semuanya difungsikan dalam jangka panjang. Sekolah Rakyat VI Tahun Baroko tidak lama difungsikan karena ditinggalkan oleh guru dan muridnya. Mereka kemudian memanfaatkan Sekolah Rakyat VI Tahun Redak. Hal ini didukung oleh catatan Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang 1890-1971 yang menyebutkan bahwa seorang Kepala Sekolah SR VI Tahun Redak yang bernama Alexander Bolong menyebut bahwa dirinya masih menjadi Kepala Sekolah dari SR VI Tahun Redak hingga tahun 1954 (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan b 2005). Sayangnya, tidak ditemukan data lebih rinci mengenai jumlah guru maupun siswa yang belajar

pada dua sekolah yang berada di bawah pengaruh DI/ TII. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengarsipan yang dilakukan negara pada wilayah ini ketika berada di bawah pengaruh DI/ TII hingga periode 1960-an. Kondisi siswanya hanya bisa dilacak melalui memori kolektif masyarakat yang pernah bersekolah di SR VI Tahun Redak.

Guru-guru yang sebelumnya telah mengajar di sekolah ini tetap diminta untuk melanjutkan tugasnya. Selain itu, guru-guru didatangkan dari Sekolah Guru bentukan DI/ TII di Malua (Sitonda 2004:115). Sekolah guru yang dibentuk oleh DI/TII di Malua memang dipersiapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berada di bawah pengawasan DI/ TII. Selain guru yang didatangkan di Malua, pasokan guru juga didapatkan dengan penculikan terhadap guru-guru diluar wilayah mereka. Seperti yang di ungkapkan Thakkalawa, di Desa Benteng Alla Utara pada 8 September 2018 berikut.

Dulu sekolah di Redak itu guru-gurunya tidak banyak, banyak mi yang sudah kabur, jadi DI/ TII dia berusaha carikan guru di luar Baroko untuk mengajar mi di sini di Redak. DI/ TII biasa ke Kalosi atau culik guru-guru di sekitar Enrekang untuk di bawah mi di sini dipaksa mengajar supaya tetap jalan ini sekolahnya DI/ TII yang di kampungnya kita ini jadi tetap kami bisa sekolah dulu meskipun ya situasinya begitu kabur-kaburan kita kalau datang lagi operasinya TNI.

Inilah alasan DI/ TII sering menculik guru-guru dan mengacaukan sekolah-sekolah yang tidak berada dalam pengawasan mereka. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa sekolah yang berada di bawah pengawasan TNI tidak beroperasi karena para guru khawatir jika berada di lingkungan sekolah karena sewaktu-waktu pasukan DI/ TII dapat saja datang.

Salah satu pembeda antara pendidikan formal DI/ TII dan pendidikan formal dengan pemerintah ialah kondisi siswanya. Siswa sekolah bentukan pemerintah banyak menggunakan seragam lengkap, sebaliknya, siswa sekolah formal DI/ TII tidak mengenakannya. Hal ini diungkapkan Yusuf di Benteng Alla Utara pada 21 Juli 2018 berikut.

Situasi waktu itu sulit karena kami dilarang keluar ke kota ya keluar Barokolah supaya tidak ketemu sama TNI. Jadi memang waktu sekolah kami tidak pakai seragam seperti anak sekolah sekarang karena bagaimana mau beli seragam nah kami dilarang keluar ke kota jadi ya kami sekolah dengan pakaian biasa saja, pakai baju kaos kadang juga ada yang pakai sarung begitu dan semua murid pada saat kami sekolah seperti itu.

DI/ TII menyadari situasi tersebut namun tidak begitu mengatur pakaian anak-anak yang bersekolah dan lebih menekankan pada pemberian materi pelajaran terutama agama kepada setiap siswa. Saat itu, DI/ TII melarang penduduk untuk ke kota dan meninggalkan Benteng Alla, guna

mengurangi potensi terjalannya komunikasi antara masyarakat dengan TNI (Lewa 2018; Rahman 2020:49).

Sekolah formal DI/ TII dimulai sekitar jam 8 pagi dan selesai menjelang Dzuhur. Materi terkait ideologi DI/ TII dan agama mendominasi pelajaran mereka selama menempuh pendidikan di SR VI Tahun Redak (Minta 2018). Tentunya pemberian materi agama dan ideologi dari DI/ TII sengaja diberikan untuk mempersiapkan pelajar-pelajar yang siap membantu serta mendukung gerakan gerilya dari pasukan DI/ TII.

Para siswa mencatat materi pelajaran pada sebuah batu pipih tipis berbentuk persegi yang mereka sebut dengan nama batu tulis. Alat yang digunakan untuk menulis terbuat dari sebuah batu yang didesain menyerupai pulpen, yang kemudian disebut dengan nama kalam tulis (Yusuf 2018). Siswa-siswa yang telah lulus dari Sekolah Rakyat VI Tahun Redak diberikan kesempatan oleh DI/ TII untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Akan tetapi, jenjang pendidikan setara SMP saat itu tidak tersedia di Benteng Alla. Oleh karenanya, DI/ TII mengarahkan mereka melanjutkan pendidikan ke daerah Malua tepatnya di daerah Pabbuluran (Kadir 2017). Sekolah ini ditempuh dengan waktu 3 sampai 5 jam berjalan kaki (Lewa 2018). Tidak semua siswa memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Situasi yang tidak kondusif dan keadaan ekonomi yang tidak baik menjadi alasannya. Dalam wawancaranya, Kadir mengatakan para siswa tidak mampu membeli celana panjang yang menjadi persyaratan untuk dapat sekolah di Malua.

2. Pendidikan Nonformal dan Informal DI/ TII

DI/ TII memberikan pendidikan nonformal dan pendidikan informal berupa pengajaran dan pendalaman Islam terhadap masyarakat. DI/ TII menyadari bahwa masyarakat yang berada di wilayah kekuasaan mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tanpa melalui sekolah-sekolah formal yang telah ada. Pendidikan yang diberikan oleh DI/TII tidak hanya diperuntukkan bagi remaja usia sekolah, yang bersekolah pada sekolah formal mereka. Penduduk lainnya yang belum bisa membaca serta menulis juga tidak luput dari perhatian DI/TII.

DI/TII membentuk program pemberantasan buta huruf dalam upaya mencerdaskan penduduk Menurut Gonggong (1992) sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan masih buta huruf. DI/ TII menyadari bahwa wilayah kekuasaannya merupakan perkampungan di tengah hutan dengan masyarakat yang jarang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan kota.

Berbeda dengan format pendidikan yang terstruktur pada Sekolah Rakyat VI Tahun Redak, program ini merupakan kursus untuk memberantas buta huruf. Program pemberantasan buta huruf ini sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai daerah untuk memberantas tingginya angka buta huruf (Ahmad 2015). Pasukan DI/TII menerapkan hal yang sama pada penduduk di daerah yang mereka kuasai. Hal ini menunjukkan DI/TII tetap mengadopsi model pendidikan yang telah diterapkan

oleh pemerintah baik pada pendidikan formal maupun nonformal.

Kursus ini biasanya diselenggarakan di bawah kolong rumah penduduk. Lama belajar sekitar 2 jam per hari. Kursus terkadang dilakukan di siang hari ataupun sore hari saat penduduk Benteng Alla yang kebanyakan berprofesi sebagai petani telah kembali dari kebun masing-masing (Lewa 2018). Tenaga pengajarnya adalah penduduk Benteng Alla yang memahami cara membaca maupun menulis. Mereka selalu didampingi oleh pasukan DI/ TII. Pemilihan tenaga pengajar pada kursus ini bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena banyak penduduk Benteng Alla yang tidak memahami Bahasa Indonesia terutama mereka yang sudah tua. Jalinan komunikasi akan yang lancar jika tenaga pengajarnya menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Melalui kursus ini, DI/ TII menginginkan agar masyarakat Benteng Alla meskipun tidak pernah mengenyam sekolah formal, mereka dapat membaca dan menulis. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Selain program pemberantasan buta huruf, dilakukan juga pendidikan informal sebagai “upaya tersebut dapat dilihat dari proses upaya pengislamisasian masyarakat Benteng Alla yang pada masa itu masih banyak menganut paham animisme berupa ajaran *Aluk Todolo* yang bersumber dari Toraja sebagai akibat dari lebih dekatnya wilayah ini ke Toraja daripada Enrekang” (Rahman 2020:16).

Misi pengislaman terhadap masyarakat Benteng Alla berjalan beriringan

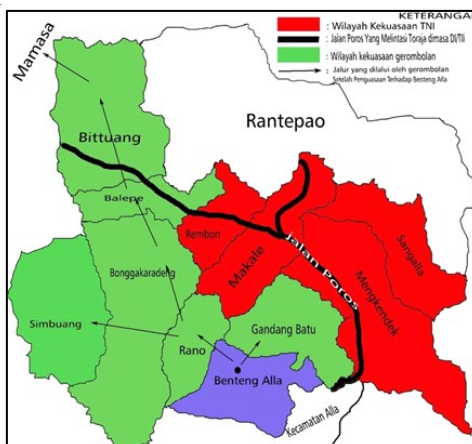
dengan pendidikan nonformal yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Yusuf, seorang ulama yang juga merupakan anggota DI/ TII didatangkan dari daerah Sangtempe, Toraja, bernama Ambe Tabang (Yusuf 2018). Dengan didampingi oleh pasukan DI/TII, Ambe Tabang mulai mengislamkan masyarakat Benteng Alla dan di situlah awal mula pengajaran informal pertama dimulai. Ia mengajarkan masyarakat cara berwudhu dan menuntun masyarakat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat (Lewa 2018).

Setiap malam Ambe Tabang rutin mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk mengajarkan Islam, terutama tata cara shalat. DI/ TII mengharapkan melalui pendekatan seperti ini masyarakat dapat dengan mudah menerima ajaran Islam dalam satu keluarga besar dan lingkungan sekitarnya. Karena itulah Ambe Tabang jadi salah satu sosok penting dari pengislaman masyarakat Benteng Alla. Kegiatan pengajaran yang dilakukan Ambe Tabang menjadi memori kolektif bagi sebagian besar masyarakat Benteng Alla. Ambe Tabang menjadi sosok yang paling diingat oleh masyarakat Benteng Alla daripada anggota DI/ TII lainnya. Salah satu pendidikan informal yang diberikan oleh DI/ TII kepada masyarakat Benteng Alla secara tidak langsung dapat tercermin dari proses Islamisasi di tempat ini.

Pengislaman yang dilakukan DI/ TII di Benteng Alla merupakan salah satu upaya untuk mengikat masyarakat Benteng Alla sebagai bagian dari gerakan DI/ TII.

3. Kondisi Pendidikan di Tengah Perjumpaan TNI dan DI/ TII di Benteng Alla

Posisi Benteng Alla yang berada di ketinggian, di tengah hutan, serta jauh dari kota sangat menguntungkan bagi pasukan DI/ TII. Mereka dapat dengan mudah memantau TNI dari ketinggian. Mereka dapat dengan leluasa keluar masuk Toraja tanpa harus melalui jalan poros yang dijadikan sebagai markas dan pos-pos penjagaan oleh TNI di beberapa titik.



Gambar 1. Peta ilustrasi jalur DI/ TII pada tahun 1950 di Toraja bagian barat melalui Benteng Alla. Sumber: diolah dari Kabubu 2017; ANRI Perwakilan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan 1995, wawancara dengan Ba'ssi, Lewa, Thakkalawa, dan S. Minta, 2017.

Mengacu pada peta ilustrasi jalur DI/ TII di Toraja Barat terlihat bahwa Benteng Alla menjadi pintu masuk DI/ TII menuju Toraja terutama Toraja bagian barat. Toraja Barat berbatasan dengan daerah Sulawesi bagian barat seperti Polman dan Mamasa. Artinya, penguasaan lebih lanjut bisa saja dilakukan oleh DI/ TII sampai ke wilayah Sulawesi bagian barat melalui

jalur yang dirintis mulai dari Benteng Alla yang berbatasan dengan Rano dan Gandang Batu.

Akan tetapi, posisi yang strategis ini sekaligus jadi ancaman bagi mereka. Satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah Benteng Alla berbatasan langsung dengan beberapa daerah Toraja seperti Gandang Batu, Rano hingga Buakayu. Daerah-daerah ini secara perlahan dapat dikuasai oleh TNI terutama sejak kedatangan Divisi Diponegoro dari Jawa Tengah dan Divisi Brawijaya dari Jawa Timur (Bigalke 2016:333). Divisi Brawijaya ditempatkan di daerah Buakayu dan kemudian mereka mampu menguasai daerah Gandang Batu sejak 1953 (Ba'ssi 2018). Wilayah yang tersisa hanyalah Rano sebagai daerah pembatas antara wilayah TNI di Buakayu dan DI/ TII di Benteng Alla. Gandang Batu yang berbatasan langsung dengan Benteng Alla pun mulai menjadi wilayah operasi rutin TNI. Hal inilah yang kemudian mulai "mengganggu" ketenangan DI/ TII dan masyarakat di Benteng Alla.

Hal inipun berdampak besar bagi jalannya proses pendidikan masyarakat di Benteng Alla yang awalnya berlangsung lancar. TNI dikabarkan melakukan pembakaran bangunan fisik, seperti rumah penduduk dan Sekolah Rakyat VI Tahun Redak (Lewa 2018). Pada tahun 1954, TNI berhasil menyisir daerah Benteng Alla hingga Redak dan kemudian membakar sekolah ini. Peristiwa ini menandai kali pertama masuknya TNI ke wilayah Benteng Alla (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan b 2005).



Gambar 2: Lokasi awal SR VI Tahun Redak.
Sumber: dokumentasi pribadi.

Saat ini, lokasi bekas sekolah rakyat di Dusun Redak telah digunakan sebagai lokasi sebuah Gereja Toraja (Getor) Jemaat Mario Redak. Sisa-sisa dari bangunan lama sekolah ini tidak dapat lagi dijumpai. Sekolah Rakyat VI Tahun Redak kemudian berpindah tempat. (lihat gambar 3)



Gambar 3: SR VI Tahun Redak yang dibangun kembali oleh DI/TII setelah dibakar oleh TNI. Sumber: dokumentasi pribadi.

Setelah TNI kembali ke Toraja, DI/ TII membangun kembali Sekolah Rakyat VI Tahun Redak namun dalam bentuk yang lebih sederhana karena kurangnya bahan dalam proses pembangunannya. Pembangunan kembali bangunan ini dimaksudkan agar pendidikan masyarakat secara formal masih tetap dapat dilaksanakan meski dalam kondisi kurang kondusif karena TNI bisa saja kembali datang berpatroli di Benteng Alla. SR VI Tahun Redak dibangun kembali di Dusun Alla. Tetapi

usia dari bangunan baru ini tidaklah lama, sebab sejak penempatan TNI di Buakayu, mereka kemudian lebih sering datang ke Benteng Alla untuk terus melakukan operasi pembersihan kepada DI/ TII. SR VI Tahun Redak yang baru dibangun kembali menjadi sasaran pembakaran oleh TNI. Saat ini lokasi sekolah tersebut telah menjadi permukiman penduduk (Yusuf 2018).



Gambar 4: Lokasi terakhir SR VI Tahun Redak sebelum masyarakat Benteng Alla mengungsi. Sumber: dokumentasi pribadi.

Akan tetapi tindakan TNI ini tidak membuat DI/ TII berhenti memberikan pendidikan kepada masyarakat Benteng Alla. Untuk kedua kalinya, bersama dengan masyarakat, DI/ TII membangun lagi Sekolah Rakyat VI Tahun Redak. Lokasinya pun dipindahkan kembali ke Dusun Redak namun bukan pada lokasi pertama kali sekolah ini dibangun. Pada lokasi ketiga (lihat gambar 4) dari berdirinya Sekolah Rakyat VI tahun Redak ini kini telah berdiri Kantor Desa Patongloan (Yusuf 2018).

Pembangunan sekolah ini menjadi pembangunan terakhir yang dilakukan oleh DI/ TII. Situasi semakin kacau dan sulit akibat semakin seringnya TNI melakukan operasi di daerah ini. Sejak terlaksananya pemilu pertama 1955, wilayah Benteng Alla mulai terusik dengan hadirnya pasukan berkuda yang

datang dari arah Gandang Batu Sillanan dengan membawa senjata dan parang. Masyarakat menyebut pasukan berkuda ini dengan nama koboi. Pasukan ini dikabarkan datang pada malam hari dan membunuh siapa saja yang mereka temui disepanjang jalan (Kadir 2017).

Pasukan koboi ini ternyata merupakan pasukan bentukan Kapten Pappang dari daerah Pangala, (sekarang bagian dari Toraja Utara). Pasukan Koboi kemudian menjalin kerja sama dengan TNI Divisi Brawijaya dalam melakukan operasi di Benteng Alla termasuk membakar kembali Sekolah Rakyat VI tahun Redak (Lewa 2018). Intensifnya patroli TNI yang kini telah mendapat bantuan dari Kapten Pappang mulai membuat pasukan DI/ TII kewalahan. Dengan alasan keamanan, pada 1957 DI/ TII menginstruksikan kepada masyarakat Benteng Alla untuk mengosongkan Benteng Alla dan mengungsi ke mana saja yang mereka anggap aman. Dalam situasi pengungsian itu, sekali lagi TNI datang melaksanakan operasi dan kali ini kembali membakar SR VI Tahun Redak (Yusuf 2018).

Masyarakat pun banyak yang berpencar keluar dari Benteng Alla. Ada yang memutuskan menuju ke Kota Enrekang ada pula yang memutuskan pergi ke daerah-daerah yang dirasa tidak begitu jauh dari Benteng Alla namun keluar dari Distrik Baroko saat itu seperti Cece, Bossok, Bolang, hingga Kalosi (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan c 2005). Setelah situasi dirasa cukup aman, masyarakat Benteng Alla berangsur-angsur mulai kembali ke tempat ini pada awal 1960. Namun

mereka mulai sulit menemukan anggota DI/ TII. Hal ini dikarenakan daerah ini dilepaskan oleh TNI dari cengkraman DI/ TII dan perlahan-lahan mulai kembali kepada pemerintah.

Sekembalinya dari pengungsian, tidak ada lagi pendidikan yang didapatkan dari DI/ TII. Kondisi ini di kenal sebagai masa transisi kembalinya Benteng Alla ke pangkuan negara (Minta 2018). Selama wilayah ini menjadi wilayah operasi TNI, pemerintah belum bisa membangun kembali pendidikan karena TNI belum tuntas membubarkan gerakan DI/ TII dan memulihkan keamanan di wilayah ini, terutama hingga tahun 1961. Dengan demikian, sejak pembakaran terakhir yang dilakukan oleh TNI terhadap SR VI Tahun Redak, masyarakat belum mengenyam kembali pendidikan. Persoalan DI/ TII di Sulawesi Selatan sendiri belum berakhir karena sosok Qahar Mudzakkar sebagai pemimpin DI/TII belum tertangkap.

Menurut Harvey (1989:328), kondisi di Sulawesi Selatan mulai dapat dikendalikan ketika memasuki tahun 1965. Dengan tambahan pasukan dari Kodam Siliwangi yang didatangkan dari Jawa Barat, Operasi Kilat TNI pimpinan M. Yusuf berhasil menewaskan Qahar Mudzakkar pada 3 Februari 1965 di daerah aliran Sungai Lasolo. Tewasnya Qahar ini menjadi awal mula melemahnya pasukan DI/TII dan perlahan-lahan gerakan ini dapat diselesaikan oleh TNI.

D. SIMPULAN

Pendidikan merupakan aspek yang dikembangkan oleh DI/ TII sebagai upaya mendirikan Negara Islam. Melalui pendidikan, DI/ TII menyadari bahwa keberlangsungan gerakan untuk mendirikan Negara Islam harus dilakukan melalui penanaman ideologi Darul Islam kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya tersebut, DI/ TII gencar melakukan aksi teror terhadap guru dan murid, dari wilayah lain bahkan hingga menculik guru-guru ke hutan. Aksi teror dilakukan DI/ TII dalam menjaga keberlangsungan pendidikan pada daerah yang berada di bawah pengaruh mereka.

Pendidikan yang diberikan DI/ TII jarang mendapat gangguan dan dianggap lebih aman sebab daerah yang berada di bawah pengaruh DI/ TII, salah satunya Benteng Alla, sulit ditembus oleh TNI. Keseriusan DI/ TII dalam mengembangkan pendidikan di Benteng Alla terlihat dari beragamnya jenis pendidikan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari pendidikan formal bagi anak-anak, pemuda, dan pelajar hingga pendidikan nonformal dan informal bagi penduduk yang lebih dewasa. Upaya pengislaman yang dilakukan DI/ TII menjadi bentuk pendidikan informal yang terlihat di Benteng Alla.

Akan tetapi, segala bentuk pendidikan yang diberikan DI/ TII di Benteng Alla tidak berlangsung lama. Tingginya intensitas operasi TNI berakibat pada hilangnya pengaruh dan kekuatan DI/ TII di wilayah ini. Bahkan, sebelum DI/ TII benar-benar dinyatakan berakhir pada 1965, wilayah Benteng

Alla telah dibebaskan dari pengaruh DI/ TII sejak 1961. Dengan demikian, aktivitas pendidikan tidak lagi berlangsung di wilayah ini.

DAFTAR SUMBER

- Ahmad, Taufik. 2015. "Pembangunan Pendidikan di Tengah Konflik dan Trauma di Luwu (1907-1980)." *Walasuji* 6(2):267-281.
- ANRI Perwakilan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1995. *Tanah Toraja 1901-1957. No Reg 829. Berkas yang Berhubungan dengan Laporan-Laporan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Tana Toraja, Antara Lain: Laporan Gangguan Keamanan/ Kekacauan di Beberapa Distrik.*
- Aqamuz, Erli (Siti Maesaroh). 2007. *Profil Abdul Qahhar Mudzakkar: Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/ TII.* Tangerang: Yayasan Al-Abrar.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan a. 2005. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang 1890-1971. No. Reg: 154. Kepala Pemerintah Negeri Enrekang: Surat-Surat Tanggal 14 November 1951-26 Juli 1956 Tentang Laporan Aksi Gerombolan di Daerah Enrekang.*
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan b. 2005. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang 1890-1971. No. Reg: 157. Kepala Daerah Pare-Pare: Surat-Surat Tahun 1952-8 Oktober 1957 Tentang Gerombolan DI/TII Melakukan Pemaksaan Kepada Masyarakat Untuk Mengungsi ke Dalam Hutan.*
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan c. 2005. *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang 1890-1971. No. Reg: 332. Kepala Daerah Enrekang: Surat-Surat Tahun 1960-1964 Tentang Laporan Aksi Gerombolan DI/TII di Wilayah Enrekang.*
- Bigalke, Terance W. 2016. *Sejarah Sosial Tana Toraja.* Yogyakarta: Ombak.
- Dijk, C. van. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- End, Th. van den. 2020. *Masa Penganiayaan, Masa Pertumbuhan: Dokumen-Dokumen Mengenai Sejarah Jemaat-Jemaat Kristen Toraja di Wilayah Kekuasaan DI-TII 1946-1972.* Makassar: Oase Intim.
- Fikram, Aco. 2021. "Gerakan DI/TII dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju Tahun 1953-1965." Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar.
- Galasa, Arsyad. 2008. "DI/TII di Tanah Duri dan Penerapan Syariat Islam." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Mudzakkar: dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Inventaris Arsip Tanah Toraja 1901-1957. No. Reg. 829. *Berkas yang Berhubungan dengan Laporan-Laporan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Tana Toraja, Antara Lain: Laporan Gangguan Keamanan/ Kekacauan di Beberapa Distrik*.
- Kabubu, Rusmala Dewi. 2017. "Gerakan DI/TII Qahar Mudzakkar di Tana Toraja 1953- 1965." Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Depok.
- Mattalioe, M. Bahar. 1965. *Kahar Muzakkar dengan Petualangannya*. Jakarta: Penerbit Delegasi.
- Muchlis, Musdalifah, Jumadi, dan Muh. Rasyid Ridha. 2019. "Sekolah Rakyat di Enrekang, 1950-1959". *Jurnal Pattingalloang* 6(2):88-98.
- Pilang, Abd Rahman. 2008. "Kepemimpinan Sanusi Daris dalam Dinamika Komunitas Duri Kabupaten Enrekang." Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Rahman, A. 2020. "Benteng Alla: Islamization of the Ancestral Land by Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia." *Indonesia Historical Studies* 4(1):42-52.
- Rahman, Abd. 2018. "Gerakan DI/ TII di Benteng Alla Kabupaten Enrekang 1953-1965.:" Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*: Jakarta: Serambi.
- Retnaningrum, Elly. 2007. "Pendidikan dan Konflik Sosial". *Educar Jurnal Pendidikan dan Budaya* 4(2): 36-40.
- Saifuddin. 2013. "Kesan Perang Terhadap Pendidikan di Berbagai Negara". *Jurnal SUWA* XI(2):120-128.
- Sitonda, Mohammad Natsir. 2004. "Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia di Massenrempulu (Studi tentang Integrasi Gerilya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia)." Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Smith, Alan. 2009. "Education and Conflict". *Education For All Global Monitoring Report 2011*. UNESCO, USA.
- Wawancara. Abd. Kadir. Kota Enrekang, 22 September 2017.
- Wawancara. Ba'ssi. Buakayu Tana Toraja, 6 September 2018.

Wawancara. Lewa. Desa Benteng Alla
Utara, 9 September 2018.

Wawancara. S. Minta. Desa Benteng
Alla Utara, 19 Juli 2018.

Wawancara. Thakkalawa. Desa
Benteng Alla Utara, 8 September
2018.

Wawancara. Yusuf. Benteng Alla Utara,
21 Juli 2018.